

PERANAN LPPOM MUI DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL DI INDONESIA(Studi di LPPOM MUI Surabaya)

 Oleh: GEYS (06400093)

Law

Dibuat: 2010-05-24 , dengan 6 file(s).

Keywords: LPPOM MUI, disiplin, manufaktur

ABSTRAK

Berangkat dari permasalahan tentang banyaknya pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan berproduksi secara halal serta adanya pelaku usaha yang sering memanfaatkan sertifikat halal hanya sebagai cara untuk meraup keuntungan telah menyebabkan masyarakat resah dan dirugikan, oleh karenanya telah menjadi perhatian oleh LPPOM-MUI Surabaya dalam menertibkan pelaku usaha tersebut. Permasalahan yang hendak penulis kaji adalah tentang : Pertama, bagaimana peranan LPPOM-MUI Surabaya dalam menertibkan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan berproduksi secara halal. Kedua adalah bagaimana tindakan LPPOM-MUI Surabaya dalam mengatasi hambatan untuk menertibkan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan berproduksi secara halal. Berdasarkan hal tersebut, penulis telah menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu melihat pelaksanaan hukum di LPPOM-MUI Surabaya. Dan untuk sumber datanya, penulis menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan pengumpulan datanya penulis lakukan secara wawancara dan dokumentasi untuk data primer dan study kepustakaan untuk data sekunder. Setelah data penulis kumpulkan, maka dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Dalam implementasinya, Peranan LPPOM-MUI Surabaya dalam menertibkan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan berproduksi secara Halal dilakukan dengan: bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dengan melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM), memberikan masukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mempermudah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal yang salah satunya diwujudkan dalam pemberian sertifikat gratis kepada pelaku usaha kecil dan menengah, serta memberikan rekomendasi terhadap LPPOM MUI Pusat dan BPKN agar Pemerintah dan DPR mengkaji ulang produk hukumnya. Sedangkan untuk mengatasi kendala dalam peranannya, LPPOM MUI Surabaya telah melaksanakan berbagai langkah/strategi, diantaranya melakukan kerjasama antara lembaga atau instansi yang terkait yaitu BPOM dalam hal pengawasan, melakukan persertifikatan halal gratis bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar IKM tersebut lebih eksis, dan melakukan rekomendasi terhadap Pemerintah dan DPR melalui LPPOM-MUI Pusat maupun BPKN

ABSTRACT

Due to comes from the concerns from many businessman who always ignoring producing policy of halal certificate and also theres many people taken benefit from it, its proven gave many

society worried and uncomfortable with it. Regarding LPPOM-MUI Surabaya took concern about how to make discipline for irresponsible people from that matters, a few things that writer want to analyse are : firstable :what the LPPOM-MUI position on discipline those people who make violation on producing policy, the second is : is it LPPOM-MUI will take punishment action for those who make violation regards on Producing policy certificate of halal. based on that matters, the writer will use approach method by sosiological yuridiction way, thats are analyse how the procedure running on LPPOM -MUI, and for the data source, writer will use primary data from interviewing and documentation and secondary data by library and filling, after that, writer will make an analyse with qualities descriptive result.

For the implementation, regards on many violation of producing policy of halal certificate LPPOM-MUI will make a move by; Cooperate with small and medium industrial community, give a legitimate input to BPOM, make a practice procedure related for an entrepreneur who will try to take the certificate such as ; will give it for free of payment for those who need it., also will strongly recommended to LPPOM-MUI centre and BPKN so the government and DPR review the policy., so far LPPOM-MUI has own strategy to follow. which are make a corporate between institution related such as BPOM on monitoring, give free of payment fcertificate or small and medium entrepreneur so they will still consistent and also give the strong recommended to government.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the role-MUI LPPOM in accordance with the provisions in the Decree on the Scope of Duty Kep-164/MUI/IV/2003 LPPOM MUI Region / province, but there are still obstacles of limited space and authority owned institutions so that these institutions are passive and only less than optimal in the discipline of business actors who violate the provisions of halal produce. This is based on the number of other institutions intervned and differing perceptions of the task and have authority each institution. It cause, is still needed for future improvements both in terms of regulation of the authority, duties, and responsibilities of each institution, and arrangements specifically for muslim customers.